

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah; dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
34. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Peraturan lain terkait bidang urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 19).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 adalah:

1. Memberikan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam menentukan lokasi program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam kelompok sasaran program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

### 1.2. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN;** Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Renja terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;** Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja yang menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra dan dokumen Renja tahun berjalan sebagai bahan acuan.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;** Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan

hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;** Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo , baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

**BAB V PENUTUP;** Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026



## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Wajo**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	100%	49 Orang	147 Orang	100%	
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Kali	5 Kali	0	0	0%	0	0	0%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%	
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Bahan Bacaan	2 Bahan Bacaan	2 Bahan Bacaan	2 Bahan Bacaan	100%	2 Bahan Bacaan	2 Bahan Bacaan	100%	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119 Kali	119 Kali	119 Kali	119 Kali	100%	119 Kali	119 Kali	100%	
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%	
	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan atau Operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	607 Eksemplar	607 Eksemplar	607 Eksemplar	607 Eksemplar	100%	607 Eksemplar	607 Eksemplar	100%	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air dan Jasa Listrik yang dipakai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Satuan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	221 Kali	221 Kali	221 Kali	221 Kali	100%	221 Kali	221 Kali	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	26 Unit	26 Unit	100%	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	26 Unit	26 Unit	100%	
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		% Ketersediaan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
	-	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Waktu koordinasi perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	-	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Peserta Konsultasi Publik RPJMD	88 Orang	88 Orang	88 Orang	88 Orang	100%	88 Orang	88 Orang	100%	
			Jumlah Peserta Konsultasi Publik RKPD	88 Orang	88 Orang	88 Orang	88 Orang	100%	88 Orang	88 Orang	100%	
		- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Peserta Konsultasi Publik Perubahan RKPD	88 Orang	88 Orang	88 Orang	88 Orang	100%	88 Orang	88 Orang	100%	
		- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Pelaksanaan Musrenbang RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	% Kehadiran Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Revisi RPJMD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
			Jumlah Dokumen RKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan Pembangunan	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
		- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan SIMDA Perencanaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Hasil Pembangunan yang sudah disusun	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
		- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perubahan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
		-	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%		
			Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%		
			Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian yang tersedia	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	
	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Hasil Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	
	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	
	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%	
	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	100%	60%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan publik yang dihasilkan (Rekomendasi)	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%	
	-	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	-	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan yang telah dikaji	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	-	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	-	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	-	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2023			Target program/kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan di bidang teknologi dan inovasi yang dihasilkan (Rekomendasi/ Naskah Akademik/ Permodelan kebijakan/ Pedoman)	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	
	-	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan (Jurnal)	1 Jurnal	1 Jurnal	1 Jurnal	1 Jurnal	100%	1 Jurnal	1 Jurnal	100%	

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 merupakan realisasi atas target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun 2024 yang didasarkan pada Renstra Perubahan Tahun 2019-2024. Pada tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo melaksanakan 2 urusan yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan, **4 program, 16 kegiatan dan 59 sub kegiatan**.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo mencapai 100%. Namun permasalahan yang timbul dalam penyusunan Renja Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

### **1. Perubahan Versi SIPD**

Sistem Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dan dalam rangka integrasi dan keselarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, berubah dari yang semula beralamatkan pada <https://wajokab.sipd.kemendagri.go.id/> beralih pada dua versi aplikasi baru SIPD dengan alamat yaitu <https://sipdri.kemendagri.go.id/> dan <https://sipd.go.id/>. Setelah melalui sosialisasi dan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2024 diputuskan menggunakan aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

### **2. Pemutakhiran Kodifikasi dan Nomenklatur pada SIPD**

Terdapat pemutakhiran kodifikasi dan nomenklatur Sub Kegiatan pada SIPD-RI pada bulan Juni tahun 2024. Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran tersebut dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025. Namun demikian, pemutakhiran tersebut terbit saat penyusunan RKPD Kabupaten Wajo dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mencapai tahapan Rancangan Akhir, sehingga diperlukan penyesuaian nomenklatur sub kegiatan beserta beberapa target dan indikatornya, sebelum dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

### **1.1.1 Kepala Badan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bidang tugasnya;
- b. menyusun kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
- c. merumuskan sasaran dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
- d. mengendalikan kebijakan, menyusun kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
- e. merumuskan program kerja dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan

- kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
  - g. membina bawahan dalam hal pelaksanaan program kerja kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
  - h. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan program kerja kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi sesuai bidang tugasnya agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;
  - i. melaksanakan aktivitas kerja kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;
  - j. mengevaluasi bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - l. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja; dan
  - o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.1.2 Sekretaris**

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan Badan Perencanaan

- Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional rencana kegiatan tahunan sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kebijakan, petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan;
  - d. merencanakan, menggerakkan, mengoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan dan mengajukan pertimbangan teknis pengelolaan sekretariat meliputi administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
  - e. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyediakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
  - j. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan perencanaan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian umum dan kepegawaian menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
  - d. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga;
  - e. mengelola melaksanakan urusan surat menyurat;
  - f. mengelola melaksanakan urusan kearsipan;
  - g. mengelola melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
  - h. mengelola melaksanakan urusan ketalaksanaan;
  - i. mengelola melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;
  - j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur;
  - l. mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - m. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
  - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan;
  - e. menyiapkan bahan serta data dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan laporan akuntabilitas instansi pemerintahan;
  - h. menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  - i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
  - j. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;
  - k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - l. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

### **1.1.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan**

1. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbag keuangan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

- pengelolaan di bidang keuangan;
- c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - d. melaksanakan penggajian pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - g. melaksanakan verifikasi terhadap keuangan dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - h. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
  - i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;
  - k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - l. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.1.3 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang

- perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya;
  - e. menyelenggarakan kebijakan dibidang perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
  - i. melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
  - j. melaksanakan pelaksanaan konsultasi publik;
  - k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
  - l. melaksanakan musrenbang kabupaten;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
  - n. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
  - o. melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan

Daerah;

- p. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;
- q. melaksanakan penyusunan profil pembangunan Daerah;
- r. melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- u. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.4 Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial**

1. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan sosial berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan sosial untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- f. menyelenggarakan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang di capai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasaan lain yang di perintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.1.5 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional kegiatan dibidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. memberi petunjuk kepada bawahan dibidang perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - c. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya;
  - d. menyelenggarakan kebijakan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - f. melaksanakan analisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah dibidang keuangan perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - g. mengoordinasikan dan melaksanakan musrenbang dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - h. melaksanakan pembinaan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - i. melaksanakan penyusunan rancangan kesepakatan dengan DRRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
  - j. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut peyimpanan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan

- perikanan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
- l. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya sesuai dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
- m. mengkoordinasikan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;
- n. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.6 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

1. Kepala Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, dan informatika statistik, persandian dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika , statistik, persandian dan kewilayahan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas kebijakan dibidang pekerjaan umum,

- penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional kegiatan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya;
  - d. menyelenggarakan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengoordinasikan, mensinergikan, dan dokumen rencana pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - g. melaksanakan analisis strategis perangkat daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - h. mengoordinasikan dan melaksanakan musrenbang di bidang perkerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - i. melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan kepada Perangkat daerah umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - j. melaksanakan penyusunan rancangan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian

- dan kewilayahan;
- k. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - l. melaksanakan evaluasi rencana dari pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya dibidang, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - m. mengoordinasikan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja pembangunan Daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;
  - n. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan kegiatan provinsi;
  - o. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yg diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.1.7 Bidang Riset dan Inovasi**

1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas pokok membantu kepala badan badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang riset dan inovasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Riset dan Inovasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang riset dan inovasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi, dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaran urusan riset dan inovasi daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas riset dan inovasi dalam bidang penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
  - d. pemantauan dan evaluasi dibidang riset dan inovasi dalam bidang penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kebijakan dan operasional kegiatan pada bidang riset dan inovasi berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yg diberikan sesuai dengan tugasnya;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang di capai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk meyempurnakan hasil kerja;
  - e. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyelenggarakan kebijakan riset dan inovasi pada bidang penyelenggraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan,serta pengembangan inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - g. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pada bidang penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan,serta pengembangan inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - i. merumuskan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan penyediaan dara dan informasi pada bidang riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

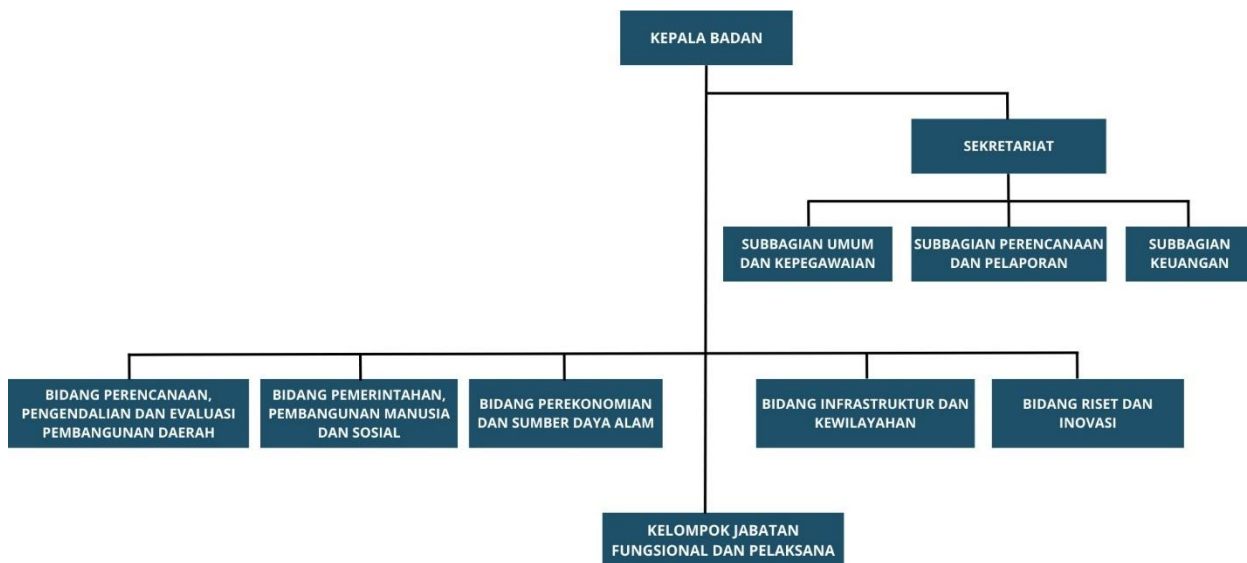
### 1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bapperida Kab. Wajo



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025

### 2.2.2 Kinerja Pelayanan OPD

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Wajo

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK/ IKU	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>												
1	Predikat/Nilai SAKIP Kabupaten pada Aspek Perencanaan	-	IKU	-	83,20	84,01	84,51	85,01	82,70	0	95,73%	89,00%
2	Predikat/Nilai SAKIP Kabupaten pada Aspek Pengukuran Kinerja	-	IKU	-	15	17	19	21	16,19	0	87,53%	78,41%
3	Rata-Rata Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	-	IKU	-	100	100	100	100	100	0	0,00%	100,00%
4	Presentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan	-	IKU	-	100	100	100	100	100	0	0,00%	100,00%
5	Indeks Inovasi	-	IKU	-	50	50	50	50	46,41	0	0,00%	0,00%

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK/ IKU	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>												
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	IKK	-	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	100,00%	100,00%
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	-	IKK	-	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	100,00%	100,00%
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	IKK	-	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	100,00%	100,00%
9	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	IKK	-	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	100,00%	100,00%
10	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	-	IKK	-	74	75	75	76	91,3	0	133,78%	100,00%

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK/ IKU	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027
11	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	-	IKK	-	75	76	77	78	91,3	0	120,00%	130,26%
12	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	IKK	-	85	86	86	88	82	0	96,47%	95,35%
13	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	IKK	-	100	100	100	100	100	0	0,00%	100,00%
14	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	-	IKK	-	100	100	100	100	100	0	0,00%	100,00%
15	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	IKK	-	100	100	100	100	19	0	0,00%	0,00%
16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	IKK	-	100	100	100	100	100	0	0,00%	17,00%

### 2.2.3 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Setiap usulan program dan kegiatan, perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah. Data informasi yang disajikan berdasarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Tabel Data Informasi, di bawah ini:

#### 1. **Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan Dengan PERDA**

Dokumen RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

#### 2. **Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran visi misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJPN dan RPJMN. Dokumen RPJMD Kabupaten Wajo untuk pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wajo meliputi :

#### 3. **Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda**

Penjabaran visi dan misi dalam dokumen RPJMD dituangkan dalam RKPD yang merupakan dokumen tahunan yang mana sejak tahun 2008 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo meliputi :

1. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2018 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 27 Tahun 2017.
2. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2018.
3. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2020 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 117 Tahun 2019.

4. **RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2021 diatur dengan Peraturan** Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2020.
5. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2022 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 113 Tahun 2021.
5. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 39 Tahun 2022.

**4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh PERDA**

Pada Tahun 2012 oleh Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kab. Wajo disusunlan Dokumen RTRW Kab. Wajo dan ditetapkan dengan PERDA Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032. Pada Tahun 2023 telah di susun Perda Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023- 2042.

**5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Wajo pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 73%. hal ini disebabkan dengan penyesuain terhadap prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Kemudian tahun 2020 meningkat tajam menjadi 99%. ini menandakan Renja OPD telah memperhatikan tujuan dan prioritas pembangunan daerah. Namun tahun 2021 menurun menjadi 75%. ini disebabkan dengan adanya perubahan regulasi terkait nomenklatur program dan kegiatan serta dengan terbitnya regulasi tentang penggunaan sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2018–2022 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3.1

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2018 s.d. 2022

		Uraian
--	--	--------

No	Tahun	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan	Persentase Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD
1	2018	229	314	73%
2	2019	229	314	73%
3	2020	322	324	99%
4	2021	206	274	75%
5	2022	206	274	75%

Sumber: Bapperida Kab. Wajo Tahun 2023

## 6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD

Penjabaran program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Wajo pada tahun 2018 sebesar 74%. Tahun 2020 meningkat cukup tajam menjadi 90% dan di tahun 2021 menjadi 99%. hal ini menandakan sinkronisasi antara pendanaan dan perencanaan semakin baik. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.3.2

Penjabaran Program RKPD kedalam APBD Tahun 2018 s.d. 2022

No	Tahun	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	Jumlah Program APBD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD
1	2018	231	314	74 %
2	2019	231	314	74 %
3	2020	322	291	90 %
4	2021	206	204	99 %
5	2022	206	204	99 %

Sumber: Bapperida Kab. Wajo Tahun 2023

## 7. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Saat ini kesesuaian dengan RTRW kabupaten masih rendah diindikasikan dengan telah dilaksanakannya beberapa program / kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang pembangunan pada program utama RTRW Kabupaten. Kesesuaian realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW sebesar 80 pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dan meningkat menjadi 82 di tahun 2020 dan stagnan hingga tahun 2021. Adanya kondisi lingkungan yang sudah kurang sesuai dengan peruntukan RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2012 – 2032 beserta Perdanya sehingga perlu dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut:

2.2.3.3  
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW  
Tahun 2018 s.d. 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	80	80	80	80	80
2	dokumen RTRW	1	1	1	1	1
	<b>Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>

Sumber: Bapperida Kab. Wajo Tahun 2023

## 8. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah sebanyak 4. Adapun jumlah kelitbangan dalam dokumen Renja Rerangkat Daerah sebanyak 4. sebanyak 3, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 6 jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti. Adapun jumlah kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 7 dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 5 jumlah kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah. Namun persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 persentase kelitbangan sebanyak 100% sedangkan pada tahun 2022 menurun sebesar 86%. Untuk itu meskipun persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mengalami penurunan sebesar 86% namun masih dalam kategori Sangat Baik,

sehingga untuk tahun selanjutnya dapat meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan.

Tabel 2.2.3.4  
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2018-2022

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	4	0	5	5	4
2	Jumlah kelitbangan dalam Renja perangkat daerah	30	0	5	5	30
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	13%	0%	100%	100%	13%

*Sumber: Bapperida Kab. Wajo. Tahun 2023*

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota; dan
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD.

Tabel 2.3  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

ASPEK CAPAIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Belum optimalnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Perubahan Renstra Bapperida Tahun 2019-2024	Terbatasnya SDM Perencana	Peraturan Perundang-Undangan yang telah tersedia	Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
					Rendahnya kompetensi aparatur
					Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja
					Rendahnya pemahaman bersama terhadap kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah
					Rendahnya kepatuhan pengusul/penerima DAK terhadap tahapan/waktu/proses/penyusunan

ASPEK CAPAIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
					Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
					Rendahnya masukan dan saran dari para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan rancangan awal dokumen perencanaan (RKPD/RPJMD)
					Rendahnya pemahaman peserta terhadap tujuan pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD
					Rendahnya partisipasi anggota DPRD dalam proses/kegiatan Musrenbang
					Sulitnya menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan
					Rendahnya kepatuhan terhadap tahapan/waktu/proses/penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

ASPEK CAPAIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan daerah	Perubahan Renstra Bapperida Tahun 2019-2024	Belum optimalnya asistensi pembangunan daerah	Kurangnya koordinasi data dan informasi pembangunan daerah antar perangkat daerah	Verifikasi dan validasi data belum dilaksanakan
					Kurang tersedianya data yang dibutuhkan dari produsen data
					Pengelolaan data dan informasi harus dilakukan dalam satu sistem
					Informasi hasil pembangunan belum menyentuh lapisan paling bawah
	Masih kurangnya pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Perubahan Renstra Bapperida Tahun 2019-2024	Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Kurangnya koordinasi data dan informasi pembangunan daerah antar perangkat daerah	Belum optimalnya pengendalian perencanaan daerah
					Belum maksimalnya penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah

ASPEK CAPAIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
					Belum optimalnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	Belum terarahnya fungsi kelitbangan daerah dalam pembangunan daerah	Perubahan Renstra Bapperida Tahun 2019-2024	Kurangnya SDM Peneliti	Kurangnya SDM yang memanfaatkan hasil kelitbangan	Sulitnya mendapatkan data sektoral dari perangkat daerah
					Minimnya SDM kelitbangan sehingga memerlukan pihak ketiga dalam pelaksanaan kelitbangan
					Masih terdapat duplikasi fungsi kelitbangan pada perangkat daerah
	Belum berkembangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi	Perubahan Renstra Bapperida Tahun 2019-2024	Belum optimalnya pengembangan inovasi	Kurangnya SDM yang ingin berinovasi	Belum optimalnya koordinasi inovasi daerah
					Masih rendahnya kapasitas dan ekosistem inovasi
					Belum adanya komitmen untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dalam pembangunan ekonomi daerah

Tabel 2.4  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran

VISI : WAJO YANG BERKARAKTER RELIGIUS, PRODUKTIF, UNGGUL, SEJAHTERA DAN AMAN				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik	1. Kurangnya SDM perencana 2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja 3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan	Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi	1. Penggunaan IT yang telah terintegrasi 2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal 3. Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya kebijakan yang berubah-ubah	Terjadi perubahan kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/pimpinan	Penyesuaian dan sinkronisasi antara aturan yang sudah ada dengan aturan yang baru
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik masih rendah dan kurang berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan	Pemahaman dan penguasaan tata cara penyusunan dokumen perencanaan oleh aparatur masih rendah	Peraturan perundang-undangan telah tersedia, SDM dan sarana serta prasarana memadai

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo turut mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap usulan perencanaan yang disampaikan ke tingkat Kabupaten, masih terbatasnya ketersediaan data yang akurat, serta masih

rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 2.5  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kabupaten Wajo

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	7.946.755.727	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100%	6.947.881.473	Bapperida
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	9 Dokumen	100%	136.877.700	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100%	163.877.700,	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	72.497.500	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	3 Dokumen	99.497.500	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.487.800	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	11.487.800	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.237.800	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	11.237.800	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	5.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	5.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	6.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	6.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	25.654.600	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	2 Laporan	25.654.600	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.686.271.534</b>	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	<b>100%</b>	<b>5.057.789.373</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	49 Orang/Bulan	49 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	5.531.271.534	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	45 Orang/Bulan	4.920.439.373	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	10.000.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	2 Laporan	1 Dokumen	143.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	115.350.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>100%</b>	2 Laporan	-	2 Laporan	6.000.000	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	2 Laporan	12.000.000	
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		0 Orang	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	5.000.000	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100%	8 Paket	1 Laporan	5.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	5.000.000	
		<b>Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>Persentase Pegawai PD yang dilayani</b>	<b>100%</b>	0 Dokumen	20 Paket	<b>100%</b>	<b>77.000.000</b>	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	<b>100%</b>	<b>115.000.000</b>	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	0 Laporan	2 Paket	100 Paket	25.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100 Paket	25.000.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	100%	2 Dokumen	6 Orang	52.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	4 Orang	90.000.000	
		<b>Administrasi Umum PD</b>	<b>Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	192 Paket	119 Laporan	<b>100%</b>	<b>451.306.493</b>	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	<b>100%</b>	<b>660.614.400</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0 Orang	1 Dokumen	10 Paket	10.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	10 Paket	10.530.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	100%	100%	15 Paket	16.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	15 Paket	16.000.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	8 Paket	0 Unit	3 Paket	20.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	3 Paket	25.084.400	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20 Paket	0 Unit	1 Dokumen	20.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	46.500.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2 Paket	100%	1 Laporan	255.088.865	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	365.000.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	115.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	122.500.000	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	119 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	15.217.628	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	75.000.000	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100%</b>	<b>340.300.000</b>	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>OPD</b>	<b>100%</b>	<b>490.100.000</b>	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	19.500.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	21.300.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	1 Laporan	200.000.000	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	1 Laporan	352.000.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2 Unit	1 Laporan	23.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	18.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	29 Unit	1 Laporan	97.800.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	98.800.000	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	1 Laporan	1 Unit	<b>100%</b>	<b>906.000.000</b>	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	<b>100%</b>	<b>191.500.000</b>	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				<b>8 Unit</b>	<b>200.000.000</b>	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD		<b>20.000.000</b>	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	1 Laporan	<b>100</b>	52 Unit	173.000.000	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	5 Unit	21.500.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	1 Dokumen	23 Unit	283.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	7 Unit	125.000.000	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	250.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD		25.000.000	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>339.000.000</b>	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>OPD</b>	<b>100%</b>	<b>259.000.000</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	12 Unit	<b>100%</b>	1 Unit	74.000.000	Bapperida Kab. Wajo	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	1 Unit	74.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	100%	100%	26 Unit	65.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	26 Unit	50.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Dokumen	1 Unit	200.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Unit	135.000.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100%	26 Unit	4 Dokumen	100%	837.742.800	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100%	1.000.888.746	
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100%	1 Unit	2 Berita Acara	100%	Bapperida Kab. Wajo		APBD	-	-	OPD	100%			
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam APBD		100%	100%	39 Berita Acara	100%	Bapperida Kab. Wajo		APBD	-	-	OPD	100%			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	39 Berita Acara	100%	387.742.800	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100%	603.048.746	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	100%	1809 Usulan	1 Dokumen	9.051.300	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	50.960.000	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	19.779.800	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	2 Dokumen	27.000.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	100%	100%	2 Berita Acara	13.676.400	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Berita Acara	25.000.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	39 Berita Acara	1 Dokumen	1 Dokumen	39 Berita Acara	7.234.700	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	39 Berita Acara	7.000.000	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	39 Berita Acara	4 Dokumen	39 Orang	2 Berita Acara	69.507.500	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Berita Acara	75.000.000	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Berita Acara	<b>100,00%</b>	4 Dokumen	249.295.200	Bapperida Kab. Wajo	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	2 Dokumen	402.798.746	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	180 Laporan	39 Berita Acara	4 Laporan	1809 Usulan	19.197.900	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	180 Usulan	15.290.000	
		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>39 Berita Acara</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	<b>100%</b>	<b>95.340.000</b>	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	14.160.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	19.500.000	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	240 Orang	1809 Usulan	100%	240 Orang	35.840.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	240 Orang	75.840.000	
		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>OPD</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.500.000</b>	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	0 Dokumen	100%	4 Laporan	208.506.500	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	3 Laporan	142.000.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	50 Orang	22 Laporan	4 Laporan	91.493.500	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	4 Laporan	60.500.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	20.000.000	
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	100%	1 Dokumen	20.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	20.000.000	
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	<b>0</b>	4 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	60.000.000	
		<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>100%</b>	<b>981.689.000</b>	<b>Bapperida Kab. Wajo</b>	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	<b>100%</b>	<b>1.036.485.000</b>	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
			Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	1 Laporan	0	0 Laporan	100%		Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100%		
			Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	100%	0	100%	100%		Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100%		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA yang terlaksana	100%	100%	3 Dokumen	100%	300.227.800	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100%	315.465.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		100%		1 Dokumen	68.843.499	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	50.125.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	<b>100%</b>	0 Laporan	1 Laporan	84.583.601	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	80.340.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	<b>100%</b>	5 Laporan	1 Laporan	146.800.700	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	2 Laporan	185.000.000	
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	3 Dokumen	3 Laporan	1 Dokumen	<b>100%</b>	<b>346.554.400</b>	Bapperida Kab. Wajo	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	<b>100%</b>	<b>365.820.000</b>	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	161.554.400	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	102.820.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0 Laporan	<b>100%</b>	1 Dokumen	52.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	121.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	<b>100%</b>	<b>100%</b>	1 Dokumen	133.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	142.000.000	
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	1 Laporan	0 Laporan	<b>100%</b>	<b>334.906.800</b>	Bapperida Kab. Wajo	<b>APBD</b>	-	-	<b>OPD</b>	<b>100%</b>	<b>355.200.000</b>	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	61.906.800	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	2 Dokumen	75.000.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	7.000.000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	54.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	45.750.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3 Dokumen		1 Laporan	130.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	143.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	5 Laporan		1 Dokumen	20.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Dokumen	16.950.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	5 Laporan		1 Laporan	65.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	67.500.000	
		Program Penelitian dan Pengembangan	Indeks Inovasi	55,80 (Inovatif) Nilai	5 Laporan		55,80 (Inovatif) Nilai	303.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	55,80 (Inovatif) Nilai	220.000.000	
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		100%		100%		100%									
	Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan daerah		100%		100%		100%									
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diterbitkan	100%	1 Dokumen		100%	138.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100%	165.000.000	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	3 Laporan		1 Laporan	138.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	165.000.000	

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Provinsi
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Riset dan Inovasi yang dilaksanakan	100%	0%		100%	165.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	100%	55.000.000	
		Uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	0 Dokumen		1 Laporan	165.000.000	Bapperida Kab. Wajo	APBD	-	-	OPD	1 Laporan	55.000.000	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2025 Kabupaten Wajo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Tabel 2.7  
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat  
Tahun 2025 Kabupaten Wajo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---



# **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air.
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara.
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Pemberantasan Kemiskinan.
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup .
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatifkarakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yaitu

mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bapperida Kabupaten Wajo mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda memperhatikan tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah yang merumuskan perencanaan dan kelitbangan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula dengan kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, maka dirumuskan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, kualitas pelaporan kinerja dengan dukungan kinerja ASN.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bapperida secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Bapperida Kabupaten Wajo dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 berada pada:

**Misi 2** : Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat

- **Tujuan 2.1**: Menghadirkan pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat dan tepat bagi seluruh masyarakat
- **Sasaran 2.1.1** : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif.
- **Sasaran 2.1.2** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Peran Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,01
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan	%	95
		Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase Hasil Riset yang digunakan Dalam Kebijakan Daerah	%	100%
			Indeks Inovasi Daerah	Nilai	53 (Sangat Inovatif)

# **BAB IV**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD TERHADAP SPM TAHUN 2026**

Perumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo terhadap SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM  
Tahun 2026

No	Indikator SPM	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
				Target	Pagu Indikatif
-	-	-	-	-	-

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Kabupaten Wajo tidak memiliki SPM.

### **4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD TERHADAP TPB/SDGS TAHUN 2026**

Perumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Kabupaten Wajo terhadap TPB/SDGs adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap  
TPB/SDGS Tahun 2026

No	Indikator TPB/SDGS	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif
1	<b>Pilar Pembangunan Sosial</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang tercapai</b>	<b>100%</b>	<b>218.409.500</b>
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	218.409.500	
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	134.409.500	
		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	59.000.000	
		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25.000.000	
2	<b>Pilar Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>

No	Indikator TPB/SDGS	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
				Target	Pagu Indikatif
			<b>Pembangunan yang tercapai</b>		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA yang terlaksana	100%	55.000.000
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	55.000.000

### 4.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2026 mencakup 4 Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4. Program Riset dan Inovasi Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Wajo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						9.108.799.448,00								8.899.965.219,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.108.799.448,00								8.899.965.219,00	
	5.01	PERENCANAAN						8.854.559.048,00								8.774.965.219,00	
1,	5,01,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.477.898.048,00							-	6.799.381.473,00	
		[ Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah ]	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	7.477.898.048,00	-	-	-	-	-	-	-	6.799.381.473,00	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				72.245.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	153.877.700,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	17.060.500,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		89.497.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	11.487.800,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		11.487.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	11.237.800,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		11.237.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik	OPD		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan pe nyeludupan	yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan me nghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital				
	5.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	6.000.100,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	16.459.500,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		25.654.600,00	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.743.757.648,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Perangkat Daerah	-	5.060.789.373,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/bulan	5.716.299.648,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Perangkat Daerah		4.920.439.373,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				00	11.458.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Perangkat Daerah		115.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Perangkat Daerah		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Perangkat Daerah	-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Perangkat Daerah		7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	Perangkat Daerah		7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	18.190.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-		12.530.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	24.000.400,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	49.952.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-		25.084.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	250.002.300,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-		365.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	6.439.700,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-		122.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	22.800.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	28.768.800,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		21.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	227.500.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		352.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	402.449.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	OPD		98.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	309.383.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	42.130.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		74.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				26 Unit	110.240.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	10.713.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	146.300.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2,	5,01,02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						<b>828.293.000,00</b>						-	<b>939.098.746,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan APBD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100	828.293.000,00	-	-	-	-	-	-	939.098.746,00	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas dan Tepat Waktu	-			100 %	386.666.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	580.758.746,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	12.681.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		50.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.0 1.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah</i>				2 Dokumen	11.126.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				1 Berita Acara	16.993.200,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				39 Berita Acara	41.750.300,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	304.116.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		402.798.746,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	109.847.500,00			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	95.840.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	16.738.500,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				240 Orang	93.109.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pemerintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan me nghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		75.840.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	216.750.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	6.Transform asi digital dan tata kelola pemerintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan me nghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	202.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				3 Laporan	163.757.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		142.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				4 Laporan	52.993.500,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		60.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	115.028.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola</i>				1 Dokumen	21.691.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	61.517.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	OPD		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	31.820.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3,	5,01,03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>						<b>548.368.000,00</b>						-	<b>1.036.485.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	548.368.000,00	-	-	-	-	-	-	1.036.485.000,00	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	-	218.409.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	365.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		142.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	134.409.500,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	OPD		102.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 1.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	59.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	OPD		121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[ Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA ]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	548.368.000,00	-	-	-	-	-	-	1.036.485.000,00	-
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	156.565.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	315.465.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				2 Laporan	55.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 2.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				1 Laporan	50.970.400,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		80.340.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		-	-	-	-	-	-	<b>548.368.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.036.485.000,00</b>	-
	5.01.03.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>				1 Laporan	50.595.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		50.125.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[ Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	548.368.000,00	-	-	-	-	-	-	1.036.485.000,00	-
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	173.393.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	OPD	-	355.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	22.397.200,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	OPD		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	3.138.800,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	86.938.500,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		45.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	43.918.600,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		143.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		16.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	13.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		67.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>254.240.400,00</b>							<b>125.000.000,00</b>	
1,	<b>5,05,03</b>	<b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>						<b>254.240.400,00</b>						-	<b>125.000.000,00</b>	
		[ Meningkatkan program riset dan inovasi daerah ]	<b>Persentase Program Riset dan Inovasi di Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>254.240.400,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>125.000.000,00</b>	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	114.302.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset														
			<i>Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset</i>				1 Naskah	114.302.900,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 8. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan tepat dengan menghadirkan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital	OPD		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		-	-	-	-	-	-	<b>254.240.400,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>125.000.000,00</b>	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	139.937.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	OPD	-	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
			<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi</i>				1 Laporan	139.937.500,00	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	OPD		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
<b>JUMLAH</b>								<b>9.108.799.448,00</b>							<b>8.899.965.219,00</b>	

# **BAB V**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

### **1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

#### **1.1.1 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah, merupakan hal yang perlu diprioritaskan oleh setiap Perangkat Daerah mengingat hal tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Indikator kinerja Bapperida Kabupaten Wajo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Kabupaten Wajo

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA (TAHUN)		KONDISI AKHIR RENSTRA
				2026	2027	
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Peran Riset dan Inovasi Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	98	99	99
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,01	84,51	86
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan	Nilai	95	96	99
	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase Hasil Riset yang digunakan Dalam Kebijakan Daerah	Persen	100%	100%	100%
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	53 (Sangat Inovatif)	56 (Sangat Inovatif)	65 (Sangat Inovatif)

### 1.1.2 Indikator Kinerja Kunci

Pada indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 terdiri atas:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dimana penentuan capaian indikator tahunan dari indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga;
2. Aspek Daya Saing Daerah, dimana capaian indikator tahunan dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan fokus sumber daya manusia; dan

3. Aspek Pelayanan Umum, dimana penentuan capaian indikator tahunan dari indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar, dan urusan pilihan.

Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2  
Penentuan Indokator Kinerja Kunci Perangkat Daerah  
Kabupaten Wajo

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Asumsi Capaian Tahun 2026	Target Tahun 2027
	Pelayanan Umum		
	Penunjang Urusan		
	Perencanaan		
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada/Tidak
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada/Tidak	Ada/Tidak
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada/Tidak
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada/Tidak
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100
	Pelayanan Umum		
	Penunjang Urusan		
	Penelitian dan Pengembangan		
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	100
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	100

## 1.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Wajo tidak memiliki SPM.

Tabel 5.3  
Penetapan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah  
Kabupaten Wajo

No	Indikator SPM	Target Nasional	Asumsi Capaian 2024	Target 2025
1	-	-	-	-

### 1.2.1 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penetapan indikator TPB/SDGs Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3  
 Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD  
 Terhadap TPB/SDGS Tahun 2026

No	Indikator TPB/SDGS	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
				Target	Pagu Indikatif
<b>1</b>	<b>Pilar Pembangunan Sosial</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang tercapai</b>	<b>100%</b>	<b>218.409.500</b>
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	218.409.500
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	134.409.500

No	Indikator TPB/SDGS	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
				Target	Pagu Indikatif
		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	59.000.000
		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25.000.000
<b>2</b>	<b>Pilar Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang tercapai</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>

No	Indikator TPB/SDGS	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
				Target	Pagu Indikatif
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA yang terlaksana	100%	55.000.000
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	55.000.000

# **BAB VI**

## **PENUTUP**

### **6.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bapperida Kabupaten Wajo secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
- 2) Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- 3) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- 4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

### **6.2 Rencana tindak lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.